ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK KENDERAAN BERMOTOR TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI ACEH

Rahmatul Fitriya^{*1}, Suparno^{*2}

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
e-mail: rahmatulfitriya93@gmail.com ^{*1}, suparno.feakt@unsyiah.ac.id ^{*2}

Abstract

Motor vehicle tax is one of the most potential local taxes for Aceh province in improving local income. This research aims to discover the rate of effectiveness of motor vehicle tax acceptance and exact portion of its contribution toward the target of Aceh's local own revenues. Kind of data used in this research are secondary data. They are collected from relevant literatures, websites, and documents which concerned on effectiveness and contribution of the acceptance of motor vehicle tax in Aceh province. The research result shows (1) the effectiveness of motor vehicle tax acceptance towards the target of local own revenues attainment has annual fluctuation which can be categorized as 'strongly (very) effective' from 2013-2014 and 'effective' in 2015. Whereas (2) the contribution of motor vehicle tax acceptance towards the target of local own revenues attainment constantly increase every year, yet it is categorized lack in 2013-2015.

Keywords: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pendahuluan

Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan adanya pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari penerimaan dalam negeri maupun pinjaman dari luar negeri. Pemerintah pusat tidak dapat terus menerus mengandalkan pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri. Oleh sebab itu, sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari penerimaan dalam negeri sangat penting dikembangkan dan ditingkatkan peranannya untuk kelangsungan hidup bangsa.

Salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (resmi, 2014:1)

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber dana terbesar dalam pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat. Pajak telah menjadi penggerak roda pembangunan yang

sangat dominan. Masyarakat harus menyadari kewajibannya untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional yaitu dengan taat membayar pajak. (Mardiasmo, 2013:16).

Berdasarkan pemungutannya, pajak Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak pusat terdiri dari PPh, PPN, dan PPnBM, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, jenis-jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Setiap provinsi atau daerah diijinkan untuk tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan apabila potensi pajak di daerah atau provinsi tersebut dipandang kurang memadai. Meskipun beberapa jenis

pajak daerah dan redistribusi daerah sudah ditetapkan dengan undang-undang ini, daerah kabupaten/kota diberikan peluang menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak dan redistribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Selain perubahan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, kedua undang-undang tersebut merubah akuntabilitas pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Semakin tinggi peran pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pengembangan serta pemerintah. Dengan demikian, apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat dari tahun ketahun dana dari pusat dan juga daerah bisa lebih leluasa dalam membelanjakan penerimaan mereka sesuai dengan prioritas pembangunan yang ada di daerah. (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh)

Penelitian yang dilakukan oleh Hasannudin dan Heice R (2013) Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara. Hasilnya menunjukkan bahwa Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Maluku Utara sudah efektif, walaupun dari tahun ketahun menunjukkan kecenderungan menurun akibat dari adanya perbedaan antara kenaikan target dengan realisasinya, sementara kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan kurangnya keseriusan dalam mengidentifikasi, dan mengoptimalkan sejumlah objek pajak yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor, dan pertumbuhannya cenderung menurun dari tahun ketahun.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak

kendaraan bermotor terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh.

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah.

2. Kajian Pustaka

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan, bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil redistribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Menurut (Resmi 2014: 8) Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Qanun Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Aceh menyebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 4 ayat (1) dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 ini disebutkan bahwa objek Pajak

Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kemudian dalam ayat (3) disebutkan bahwa dikecualikan dari Objek PKB adalah:

- a. Kereta Api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan perwakilan negara asing dengan azas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
- d. Pabrikasi atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dijual, dan
- e. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Pada pasal 5 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 ini, menyebutkan bahwa subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Oleh karenanya dalam ayat (2) disebutkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Subjek Pajak atas Kendaraan Bermotor adalah (Pasal 4 Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah) :

- a. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- b. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- c. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok (Pasal 5 Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah) :

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
2. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Menurut Qanun Nomor 2 tahun 2012, hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan pembagiannya sebagai berikut:

1. bagian Provinsi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan
2. bagian Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).

Selanjutnya didalam Qanun tersebut dijelaskan bahwa bagian penerimaan kabupaten/kota setelah dibulatkan 100% (seratus persen) dibagi kepada kabupaten/kota dalam Provinsi sebagai berikut:

1. 50% (lima puluh persen) dibagi berdasarkan potensi/realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk masing-masing Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan
2. 50% (lima puluh persen) dibagi rata, kepada seluruh Kabupaten/Kota.

Efektivitas

Menurut Halim (2004 : 166) menyatakan bahwa efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektivitas adalah ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Apabila dikaitkan dengan pemungutan pajak atas kendaraan bermotor, maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak atas kendaraan bermotor berhasil mencapai potensi dan atau target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Kontribusi

Menurut Mahmudi (2010:145) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Jadi kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya maka akan memberikan peluang kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian Terdahulu

Menurut Rompis (2015) menyimpulkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2011-2014

memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya sehingga hal ini mempengaruhi jumlah PAD yang diterima Provinsi Sulawesi Utara.

Mokoginta (2015) melalui penelitiannya menunjukkan bahwa prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sudah efektif, begitupun dengan penerimaan pajaknya, sedangkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sari (2013) melalui penelitiannya bahwa pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap PAD. Hal ini dikarenakan pencapaian realisasi dari PKB dan BBNKB pada tahun anggaran 2009-2012 selalu melihat target.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan yaitu data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor Provinsi Aceh tahun anggaran 2013 sampai 2015. Menurut Sekaran (2013:4) mengemukakan “metode penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian empiris dimana data adalah dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung/angka.” Penelitian deskriptif kuantitatif memerhatikan pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik.

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (DPKA).

Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor serta jumlah kendaraan bermotor Provinsi Aceh tahun anggaran 2013 sampai 2015. Menurut Sugiyono (2010:13), data sekunder mengacu kepada data yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Menurut Sugiono (2008:82) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan,

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku laporan realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. (BPKA)

Metode Analisis Data

1. Analisis Efektivitas

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan PKB terhadap pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan menghitung perbandingan antara penerimaan dan potensi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2013-2015. Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, diperoleh dari seluruh jumlah pajak kendaraan bermotor yang diperoleh dari tiap Samsat yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Efektivitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Rima,2012)

$$\text{Efektifitas PKB} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PKB}}{\text{PKB}} \times 100\%$$

Target penerimaan PKB

Guna untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Interprestasi Nilai Efektifitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, kepmendagri No. 690.900.327 (Rima Adelina,2012)

2. Analisis Kontribusi

Menurut (Gurtitno 1997:49) kontribusi merupakan sesuatu yang diberikan bersama – sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu. Sehingga dalam penelitian ini kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak atas Kendaraan Bemotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, digunakan rumus sebagai berikut (velayati at al:2013)

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Penilaian kinerja rasio kontribusi dapat dilihat pada

Tabel 3.2

Tabel 3.2
Klasifikasi kriteria kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik

>50%	Sangat Baik
------	-------------

Sumber: Depdagri, kepmendagri No. 690.900.327 (Velayati *at al*, 2013)

4. Hasil Penelitian

Efektivitas Penerimaan PKB

Berdasarkan data yang diperoleh, hasil presentase efektivitas penerimaan PKB di provinsi aceh secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2

Target dan Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor
Provinsi Aceh Tahun 2013-2015

Tahun	Target PKB	Realisasi PKB	Persentase	Kriteria
2013	221.969.651.177	258.019.742.851	116,24 %	Sangat efektif
2014	258.376.842.922	279.072.993.463	108,01 %	Sangat efektif
2015	332.095.021.139	302.530.897.102	91,07 %	Efektif
Rata – rata			105.10%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor rata-rata dari tahun 2013-2015 adalah sebesar 105.10 berdasarkan pada kriteria dalam persentase tersebut adalah sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dalam hal ini Badan

Pengelolaan Keuangan Aceh dinilai sangat baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Kontribusi Penerimaan PKB

Besarnya kontribusi penerimaan PKB terhadap pendapatan asli daerah di provinsi aceh selengkapanya dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor pada PAD di Provinsi Aceh Tahun 2013-2015

Tahun	Realisasi PKB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase	Kriteria
2013	258.019.742.851	1.396.095.430.738	18,48 %	Kurang
2014	279.072.993.463	1.779.626.321.281	15,68 %	Kurang
2015	302.530.897.102	1.914.345.718.874	15,80 %	Kurang
Rata – rata			16.65 %	Kurang

Sumber: Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata dari tahun 2013-2015 adalah sebesar 16.65%, jika berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut diatas maka penilaiannya adalah kurang baik. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Aceh kurang dalam mengidentifikasi, dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong dalam objek pajak kendaraan bermotor,

sehingga kontribusinya terhadap PAD kurang memuaskan.

5. Kesimpulan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh adalah sangat efektif dengan perolehan rata-rata persentase sebesar 105,10%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dinilai sangat baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor.
2. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Aceh adalah kurang, dengan perolehan rata-rata persentase sebesar 16,65%. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Aceh kurang dalam mengidentifikasi, dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong dalam objek pajak kendaraan bermotor, sehingga kontribusinya terhadap PAD kurang memuaskan.

Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat ditemukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor di Provinsi Aceh, maka diharapkan kepada pemerintah melalui pihak terkait agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak dengan tetap meningkatkan sosialisasi, melakukan upaya peningkatan pelayanan dengan menggunakan SAMSAT keliling dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar PKB secara online.
2. Kepada pihak yang terkait dalam Qanun No 12 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh dalam hal Pajak Kendaraan Bermotor, agar menurunkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sehingga dalam penerimaan realisasi PKB sesuai dengan target yang telah ditentukan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas, mengingat masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi pencapaian target terhadap pendapatan asli daerah dengan persentase yang cukup besar, maka diharapkan peneliti selanjutnya untuk dapat menggali spesifikasi potensi pencapaian target terhadap pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor sehingga benar-benar dapat

memberikan hasil penelitian yang lebih kuat dan memuaskan.

Daftar Pustaka

- Adelina, Rima. 2012. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik*. Universitas Negeri Surabaya. Skripsi.
- Asih, Woro Wiryaningtyas. 2009. *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pembayaran Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Pemalang*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Provinsi Aceh Dalam Angka*.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Cetakan 1. PT. Macan Jaya Cemerlang, Jakarta.
- Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh 2016. *Provinsi Aceh*
- Guritno, T. 1997. *Kamus Ekonomi-bisnis-perbankan : Inggris-Indonesia*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hasanuddin dan Wokas, Heinze, R. N. (2013) *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Maluku Utara*. Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Karina, Budiarsi. 2016. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo*.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Jilid 2*. Yogyakarta UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2103. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Publisher
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.
- Marihot, Sihan. 2013. *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Martoyo, Susilo. 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia Adisi 3*. BPFE, Yogyakarta.
- Mokoginta, Nani Chairani. 2015. *Analisis Efektivitas*

- Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Nurcholis Hanif. 2012. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Grasindo.
- Qanun Nomor 7 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi.
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8*. Jakarta: Salemba empat
- Rompis, Natalia Ester. 2015. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Rooy, Budiarto. 2015. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Raja Ampat.
- Santoso, Purbayu Budi dan Rahayu, Retno puji. *Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri*. Jurnal Dinamika Pembangunan Vol.2 No. 1, Juli 2005, Halaman 9-18
- Sari, Tri Mustika. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah).
- Sedarmayanti dan Hidayat Syarifudin. 2011. *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Sekaran, Uma. 2013. *Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta.
- Siahan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sofyan, Amirullah. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Provinsi Sulawesi Barat.
- Suandy, Erly.2011. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiono. 2013. *Statistik Untuk Penelitian*. CV Alfabeta. Bandung.
- Tarigan, K Wanta. 2013. *Jurnal Emba ISSN 2303-1174 Vol.1 3 juni 2013, hal 282-291*. Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratam Manado, Universitas Sam Ratulangi.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 20014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Velayati, M Rizkika, at al. 2013. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan tunggakan pajak. Studi pada kantor pelayanan pajak pratama baru tahun 2010-2012*. Universitas Brawijaya. Skripsi.